

MODEL SELEKSI CALON MAHASISWA BARU PERGURUAN TINGGI NEGERI YANG AKURAT DAN BERKEADILAN

Zulkifi Matondang

Dosen Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan FT Unimed

e-mail: zulkiflimato@yahoo.com

Absrak: Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan model seleksi masuk PTN yang bercirikan kecermatan prediksi (akurat) dan berkeadilan. Metode penulisan ini dilakukan berdasarkan kajian literatur. Hasil kajian yaitu: 1) model seleksi PTN yang akurat dan berkeadilan merupakan pilihan alternatif yang sesuai dengan kondisi Indonesia. 2) model seleksi menerapkan dua jalur, yaitu a) menjaring bibit unggul (yang terbaik) pada tiap daerah menurut rata-rata nilai UN dan b) menjaring calon lainnya yang mempunyai potensi akademik yang layak, 3) Realisasi model seleksi ini dapat ditempuh melalui a) penentuan sumber dan jumlah calon mahasiswa yang mungkin dapat diterima, b) kriteria penerimaan dan c) pelaksana. Sumber dan jumlah calon yang mungkin dapat diterima dan kriteria penerimaan diatur melalui aturan khusus oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dengan memperhatikan konsep *equity*.

Kata kunci: model seleksi, akurat, berkeadilan, PTN

Absract: The aim of this article are to description of selection model which justice prediction accurate. This writing method done by literature study. Result of study that is: 1) model accurate selection of PTN and justice represent alternative choice matching with the Indonesia condition 2) model selection apply two band, that is a) be net a bit of blood (the best) at each district according to mean of UN, and b) be net other candidate having competent potency akademik 3) Realization model this selection earn gone through through a) the source determination and sum up student candidate which acceptable possible, b) the acceptance criterion and c) the executor. Source and sum up candidate which acceptable possible and the acceptance criterion arranged through special order by Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) with paying attention to concept equity

Keywords: selection model, accurate, justice, PTN

A. Pendahuluan

Pembangunan dewasa ini membutuhkan tenaga-tenaga trampil yang mampu menjadi penggerak dan pelaksana proses pembangunan serta mampu menanggapi dan memecahkan masalah di sekitarnya. Oleh sebab itu, perguruan tinggi diharapkan dapat

menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan tersebut.

Hasil pengamatan penulis dari tahun ke tahun, nampaknya minat lulusan SMA/MA/SMK untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) cukup tinggi. Data tahun 2004 yang dilaporkan oleh Depdiknas

(2005), terdapat 258.112 pelamar melalui SPMB, sedangkan yang diterima 82.190 orang (31,83 %).

Tingginya minat memasuki perguruan tinggi ini menunjukkan bahwa mahasiswa perguruan tinggi merupakan modal dan asset bangsa yang potensial. Namun bilamana sumber daya ini tidak disiapkan, dibina, dan dimanfaatkan dengan tepat malah dapat membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi kehidupan sosial politik. Bilamana pemerintah melalui lembaga-lembaga pendidikan tinggi hanya mencapai target kuantitas keluaran (*out-put*) tanpa disertai kualitas yang terencana dengan baik, akan melahirkan masyarakat berpendidikan yang frustrasi.

Menyadari akan hal ini, untuk menghasilkan *out-put* yang berkualitas secara optimal, perguruan tinggi telah melakukan berbagai upaya pembenahan. Pembenahan dilakukan dimulai dari segi input maupun dari segi prosesnya. Salah satu pembenahan dari segi *input* adalah pelaksanaan seleksi terhadap calon mahasiswa yang mempunyai kompetensi yang memadai untuk belajar pada suatu program studi di perguruan tinggi.

Seleksi masuk perguruan tinggi di Indonesia sudah dikenal sejak tahun 1956 (Sumadi Suryabrata, 1989) dan kemudian pada tahun-tahun selanjutnya telah terjadi perubahan-perubahan sistem seleksi sebagai upaya perbaikan dan pengembangan dalam rangka mengatasi kelemahan dan kekurangan yang pernah terjadi.

Adapun perubahan-perubahan sistem seleksi yang dimaksud sebagai upaya perbaikan dan pengembangan adalah sebagai berikut: 1) Sebelum 1970, masing-masing fakultas dari Perguruan Tinggi Negeri menyelenggarakan ujian seleksinya sendiri. Hal

ini dirasakan berat bagi calon mahasiswa yang harus pindah dari tempat yang satu ke tempat lain untuk ujian seleksi. Selain itu tidak ada koordinasi antar fakultas dalam satu universitas. 2) Mulai tahun 1970, ujian seleksi masuk perguruan tinggi disatukan dalam satu universitas dan hanya dibedakan atas pilihan kelompok eksakta dan non-eksakta. Perubahan ini masih dirasakan sebagai suatu masalah, yaitu bagi calon mahasiswa dari suatu daerah, khususnya dari luar pulau Jawa yang harus mengeluarkan biaya besar untuk dapat mengikuti ujian seleksi pada universitas di pulau Jawa. 3) Mulai tahun 1977 diperkenalkan model seleksi sistem seleksi bersama yang diselenggarakan oleh SKALU (Sekretariat Kerja Sama Antar Lima Universitas, yaitu UI, ITB, IPB, UGM, dan UNAIR). 4) Dua tahun berikutnya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (kini Depdiknas) menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru dengan nama Proyek Perintis, dengan empat kategori yaitu Proyek Perintis I, Proyek Perintis II, Proyek Perintis III dan Proyek Perintis IV. Khusus Proyek Perintis IV tergabung 10 IKIP Negeri. 5) Mulai tahun 1984, Depdikbud menerapkan model seleksi masuk perguruan tinggi yang dikenal Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SIPENMARU). Dalam sistem ini terdapat program khusus yang dimaksudkan untuk menjaring bibit unggul daerah, yang dikenal dengan Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK). 6) Mulai tahun 1989, model SIPENMARU diubah lagi menjadi model Ujian Masuk Perguruan Tinggi (UMPTN), yang pada dasarnya sama dengan SIPENMARU yang didesentralisasikan menjadi tiga rayon, tetapi tanpa PMDK. Namun demikian,

beberapa perguruan tinggi tetap melaksanakan program khusus yang tujuannya senada dengan program PMDK. SIPENMARU bertahan hingga tahun 2001. dan 7) Menyusul dengan keluarannya SK Mendiknas No. 173/U/2001 sistem penerimaan mahasiswa baru berubah nama menjadi SPMB, yang berlaku hingga saat ini (Sumadi Suryabrata, 1989; Depdiknas, 2005).

Di Indonesia, kemampuan perguruan tinggi untuk menerima mahasiswa baru adalah kecil. Data peserta SPMB tahun 2004 (Depdiknas, 2005) berjumlah 258.112 orang, jumlah yang diterima 82.190 orang, berarti hanya 31,84 % dari jumlah pelamar yang diterima untuk mengisi kursi mahasiswa baru di 49 PTN (Tahun 2005 sekarang ini diikuti oleh 51 PTN setelah Universitas Malikussaleh di Lhok Seumawe Nanggroe Aceh Darussalam dan Universitas Khaerun di Ternate Maluku Utara bergabung). Keterbatasan daya tampung inilah menyebabkan perguruan tinggi hanya memilih calon-calon mahasiswa yang terbaik saja dari para pendaftar yang ada.

Menurut Sumadi Suryabrata (1989:1), terdapat beberapa alasan, mengapa perguruan tinggi bersifat selektif dalam menerima mahasiswa barunya, antara lain: (1) posisi-posisi penting dalam masyarakat dipegang oleh orang-orang yang pernah mengenyam pendidikan tinggi. Para pemegang kebijakan dan pemimpin perguruan tinggi menginginkan “kepastian” bahwa para mahasiswa yang dipersiapkan untuk memegang posisi-posisi penting di masa yang akan datang adalah benar-benar bermutu sesuai dengan yang diharapkan; (2) kesempatan untuk dapat belajar di perguruan tinggi adalah kesempatan yang “langkah” dan

karena itu, hanya disediakan bagi mereka yang benar-benar berhak mendapatkannya. Dengan sistem seleksi yang baik diharapkan dapat diidentifikasi calon-calon mahasiswa yang memiliki potensi untuk berhasil dengan baik sekiranya mereka belajar di perguruan tinggi.; (3) pendidikan tinggi adalah suatu pendidikan formal yang memerlukan biaya yang sangat mahal, oleh karena itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin.

Permasalahan sistem seleksi mahasiswa baru (SPMB) akhir-akhir ini banyak diperdebatkan lagi. Topik perdebatan tersebut berkisar pada akurasi dan keadilan (*equity*). Kedua faktor ini merupakan tuntutan perguruan tinggi dan masyarakat yang berhadapan ke depan kiranya kedua faktor tersebut menjadi acuan dominan dalam penentuan model seleksi mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Hal ini menunjukkan bahwa sistem seleksi yang telah ada masih perlu terus diperbaiki dan disesuaikan dengan perkembangan pendidikan dan tuntutan masyarakat.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan di atas maka sistem seleksi mahasiswa baru selalu menjadi hal yang penting bagi kemajuan pendidikan suatu bangsa. Keputusan penerimaan atau penolakan calon-calon mahasiswa merupakan keputusan yang sangat besar maknanya bagi generasi bangsa kita di saat-saat mendatang.

Persaingan masuk Perguruan Tinggi Negeri semakin ketat. Sejak diperkenalkannya sistem SIPENMARU secara nasional di tahun 1984 sebagai gantinya sistem seleksi pola perintis I, II, III, dan IV, dapat diamati bahwa sejak itu persaingan masuk Perguruan Tinggi Negeri selalu ketat. Sebagaimana yang telah dikemukakan

di atas, pada tahun 2004, peserta SPMB yang diterima hanya 31,84 % dari jumlah pelamar.

Tingginya tingkat persaingan masuk di Perguruan Tinggi Negeri PTN menunjukkan bahwa masyarakat mulai menilai semakin pentingnya pendidikan tinggi bagi putra-putrinya agar dapat menembus strata social dan ekonomi yang lebih tinggi secara vertikal.

Menjaring calon mahasiswa yang benar-benar berkualitas dan siap belajar di perguruan tinggi memerlukan persiapan, pemikiran, tenaga dan biaya yang diharapkan cenderung efisien. Di samping itu, hendaknya sistem penerimaan mahasiswa baru di PTN memperhatikan keragaman daerah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep pemikiran ini yang menjadi arahan penulis untuk membangun model seleksi mahasiswa baru di PTN yang akurat dan berkeadilan.

Proses seleksi yang diikuti oleh banyak calon (sebagaimana yang terjadi selama ini) cenderung menjadi kurang efektif, sebab pengontrolan terhadap calon yang terlalu besar jumlahnya cenderung menjadi kurang tidak ketat. Akibatnya sasaran yang ingin dicapai yaitu untuk mendapatkan bibit unggul kurang mengena.

Sampai saat ini, seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri dilaksanakan dengan ujian tertulis yang bersifat tes prestasi belajar. Model seleksi seperti ini yang terlalu menghubungkan dengan prinsip penilaian kurang memenuhi syarat. Penilaian yang baik adalah penilaian yang bersifat berkesinambungan. Penilaian yang dilakukan satu kali bisa terjadi skor yang diperoleh secara kebetulan, dan tidak mencerminkan skor individu yang sebenarnya.

Sejak kurun waktu tertentu, beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia, di samping menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru yang seragam secara nasional (dengan SPMB), juga mereka menyelenggarakan sistem penerimaan dengan khas masing-masing perguruan tinggi yang melaksanakannya.

Di UGM, 75 % *input* mahasiswa barunya diperoleh melalui Ujian Mandiri (UM), sedangkan sisanya (25 %) diperoleh melalui SPMB. Di IPB, juga berlaku hal yang sama, *input* mahasiswa barunya berasal dari hasil seleksi yang diberi nama Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI), sisanya diperoleh dari hasil SPMB. ITB di samping menerima mahasiswa barunya dari hasil SPMB, juga menyelenggarakan sistem seleksi melalui pengamatan langsung di sekolah disertai dengan wawancara. Hal ini dilakukan oleh ITB, untuk melengkapi outputnya yang tidak sekedar unggul dalam hal akademik, tetapi juga memiliki kepemimpinan, kreativitas, internalisasi dan sikap-sikap yang lain (Depdiknas, 2005).

Demikian permasalahan yang terkait dengan sistem seleksi mahasiswa baru saat ini, hendaknya permasalahan tersebut secepatnya dipecahkan dengan memberikan alternatif model seleksi yang mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak, terutama harapan masyarakat kita Indonesia.

Tulisan ini bertujuan (1) untuk mendeskripsikan model seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri yang bercirikan kecermatan prediksi (akurat) dan berkeadilan, (2) memaparkan implementasi model seleksi tersebut dalam wujud perencanaan operasional penerimaan calon

mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri.

B. Pembahasan

Sebagaimana yang telah dirumuskan pada pendahuluan bahwa fokus pembahasan dalam makalah ini adalah model seleksi calon mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri yang akurat dan berkeadilan. Oleh karena itu, kajian konsep, norma dan fakta yang dibahas dalam bagian ini adalah kajian konsep, norma dan fakta yang berkaitan dengan focus pembahasan.

1. Kecermatan Prediksi

Dalam teori pengukuran, konsep kecermatan prediksi berkaitan dengan validitas prediksi (*predictive validity*). Validitas prediksi menunjukkan kepada hubungan antara tes skor yang diperoleh peserta tes dengan keadaan yang akan terjadi diwaktu yang akan datang (Azwar, 1986; Croker & Algina, 1986; Surapranata, 2004).

Dikaitkan dengan pengertian validitas prediksi tersebut di atas, maka sesungguhnya seleksi calon mahasiswa baru pada hakekatnya berkaitan dengan prediksi, sebagai dasar mengambil keputusan untuk menolak atau menerima pelamar (calon) menjadi mahasiswa baru. Konsep prediksi juga berkaitan dengan kualitas input. Oleh karena itu, untuk memperkecil tingkat kegagalan mahasiswa dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi sebagai akibat kualitas input yang jelek maka diperlukan alat seleksi yang akurat.

Suatu model seleksi yang memiliki kecermatan prediksi yang baik (akurat) adalah apabila pelamar yang diterima sebagai mahasiswa baru (yang diprediksikan akan berhasil), akhirnya memang berhasil, sedangkan

pelamar yang ditolak akan gagal sekiranya mereka diterima.

Menurut Sumadi Suryabrata (1989: 5), sebagai akibat dari keputusan seleksi, maka pelamar kemudian terbagi menjadi empat kelompok, yaitu: 1) mereka yang diprediksikan akan berhasil dan ternyata berhasil, 2) mereka yang diprediksikan akan gagal dan ternyata gagal, 3) mereka yang diprediksikan akan berhasil tetapi gagal (meleset negatif), dan 4) mereka yang diprediksikan akan gagal sekiranya diterima tetapi ternyata berhasil sekiranya diterima (terbukti mereka berhasil di perguruan tinggi lain; meleset positif).

Berdasarkan pada pengelompokan tersebut di atas, nampak bahwa kelompok ketiga dan keempat cenderung menimbulkan masalah yang bersumber dari melesetnya prediksi. Melesetnya prediksi berdampak pada kerugian. Contohnya, pada kelompok ketiga (diprediksikan akan berhasil tetapi gagal), biaya yang dikeluarkan selama proses pendidikan ternyata mubasir (mengalami kerugian), karena gagal; oleh karena itu harusnya tempat mereka ditempati oleh mereka yang lebih potensial.

Dengan demikian, persoalan kecermatan prediksi berkenaan dengan masalah akurasi alat seleksi atau "bagaimana caranya menekan kemelesatan prediksi menjadi sekecil mungkin. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa alat seleksi yang akurat bersumber dari model seleksi yang memiliki kecermatan prediksi yang baik. Model seleksi tersebut dapat memberikan prediksi yang akurat (tidak meleset) jika pelamar yang diterima sebagai mahasiswa baru (yang diprediksikan akan berhasil), akhirnya memang berhasil, sedangkan

pelamar yang ditolak akan gagal sekiranya mereka diterima.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa seleksi calon mahasiswa baru merupakan upaya untuk menjaring *input* yang berkualitas. KARLOF and OBSTBLOM (1993), menjelaskan bahwa kualitas (*quality*) merupakan salah satu komponen dasar konsep efisiensi. Oleh karena itu sistem penjurangan untuk mendapat informasi yang berkualitas menjadi hal yang penting. Terkait dengan pernyataan tersebut maka penjurangan atau seleksi *input* yang berkualitas berkaitan dengan harapan (prediksi) ke-suksesan mahasiswa dalam studinya sesuai dengan kurun waktu normal minimum yang diberikan oleh pihak perguruan tinggi.

Di pihak lain, penulis memahami bahwa kesuksesan mahasiswa dalam studi tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas *input* tetapi juga dipengaruhi, kalau saja kualitas *input* jelek, maka hal ini akan memperlambat proses pembelajaran yang dapat menyebabkan kegagalan mahasiswa tersebut, ataupun berhasil tapi memerlukan waktu studi yang lama.

Selama ini, alat seleksi yang digunakan sebagai dasar menentukan kelulusan calon mahasiswa menjadi mahasiswa baru adalah tes prestasi hasil belajar yang cenderung berorientasi pada materi kurikulum SMA/ MA/SMK. Cara ini berdampak ketidak-adilan pada tamatan SMA/ MA/SMK yang proses pembelajarannya tidak maksimal karena fasilitas pembelajaran di sekolah tersebut kurang memadai. Oleh karena itu, perlu dipikirkan alat seleksi yang cenderung adil bagi semua kelompok dan tetap memiliki

akurasi prediksi yang memadai. Pemikiran tentang hal ini dibahas pada bagian berikutnya, yaitu pembahasan

2. Konsep Keadilan (Equity)

Sutton (1992) mengangkat issue keadilan (*equity*) dalam pendidikan dengan membedakan konsep keadilan (*equity*) dan persamaan (*equality*). Menurut Secada sebagaimana yang dikutip Sutton (1992), keadilan (*equity*) berkaitan dengan pemberian perlakuan yang sama kepada setiap individu atau kelompok (bersifat kualitatif), sedangkan persamaan (*equality*) berkaitan dengan konsep pemerataan secara kuantitatif.

Menurut Good & Brophy (1986) dan Harvey & Klein (1989), *equity* dalam praktek persekolahan dapat ditunjukkan dalam bentuk *input*, proses dan output. Salah satu indikator *input* adalah kualitas masukan. Kualitas masukan yang riil dapat diperoleh melalui seleksi masuk.

Secara normatif, konsep keadilan (*equity*) dalam lingkup kebangsaan dan kenegaraan telah dinyatakan dalam UUD 1945 dan UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam UUD 1945, konsep keadilan (*equity*) dinyatakan dalam dua pasal yang berbeda, yaitu: (1) Pasal 28H, Ayat 2 yang berbunyi: setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, (2) Pasal 31, Ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Dalam Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, konsep keadilan (*equity*) telah dinyatakan dalam tiga

pasal, yaitu: (1) Pasal 4 Ayat 1, yang berbunyi; Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, (2) Pasal 5 Ayat 1, yang berbunyi: setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. (3) Pasal 19 Ayat 2, yang berbunyi: Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.

Di pihak lain, konsep keadilan (*equity*) merupakan salah satu wujud untuk membangun nilai-nilai kebangsaan serta berperan sebagai wahana untuk pemererat nilai-nilai kesatuan dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau, suku dengan latar belakang ekonomi yang sangat beragam (ada yang kaya dan sangat banyak juga yang miskin) memerlukan perlakuan yang adil. Belum lagi fakta di lapangan bahwa keberadaan sekolah-sekolah di Indonesia juga sangat bervariasi, ada sekolah yang sangat maju, tetapi ada juga kelompok siswa di daerah tertentu yang belajar hanya di bawah pohon-pohon karena tidak mempunyai bangunan sekolah.

Dengan demikian, secara juridis formal, konsep keadilan (*equity*) telah mendapat landasan hukum yang sangat kokoh serta dukungan fakta kondisi Negara Indonesia yang heterogen (dalam semua aspek) layak untuk menerapkan konsep keadilan (*equity*) dalam segala aspek kehidupan ber-negara dan bermasyarakat, terutama aspek keadilan (*equity*) dalam penerimaan calon mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri.

Berdasarkan pada pengertian konsep keadilan (*equity*), dan dukungan fakta di lapangan serta kajian normatifnya, dapat dinyatakan bahwa sistem seleksi calon mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri harus memperhatikan keadilan (*equity*). Sistem seleksi yang adil adalah sistem seleksi yang memberikan perlakuan yang sama untuk semua calon.

Konsep keadilan berbeda dengan konsep pemerataan. Pemerataan bisa berarti pembagian jatah mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi menurut daerah, sedangkan konsep keadilan mengacu pada penggunaan informasi tentang potensi akademik calon mahasiswa dan informasi tentang kelompok yang perlu ditingkatkan (perluasan dari konsep *equity* dari Secada (1989), dan Sutton (1992). Informasi tentang potensi akademik calon mahasiswa dapat diperoleh melalui tes potensi akademik, sedangkan informasi tentang kelompok yang perlu ditingkatkan tergantung pada daerah letak universitas negeri berada. Oleh karena itu, agar dikatakan adil maka semua calon mahasiswa harus mengikuti tes seleksi.

Asumsi yang menjadi pijakan penulis bahwa tes potensi akademik dapat digunakan untuk menjaring bibit unggul adalah bahwa distribusi potensi akademik calon mahasiswa untuk setiap kategori mencakup calon dari semua kelompok, kelompok ini bisa berupa daerah. Dengan kata lain, tiap daerah memiliki calon yang berpotensi rendah, sedang, dan tinggi (konsep normalitas) untuk belajar di perguruan tinggi sehingga dengan menggunakan tes, bibit unggul yang ada di semua daerah akan terjaring.

Untuk itu, materi tes seleksi calon mahasiswa baru yang digunakan

di Indonesia sebaiknya mengukur potensi akademik, yaitu penalaran dalam menggunakan konsep-konsep dasar yang ada dalam pelajaran seperti yang telah dikembangkan di Negara-negara maju. Konsep-konsep dasar ini harus dijabarkan agar diketahui oleh semua calon mahasiswa. Materi tesnya bisa terdiri dari tiga komponen saja, yaitu verbal, kuantitatif, dan penalaran. Perkembangan tiga komponen ini akibat interaksi dengan lingkungan adalah lambat. Kemampuan dalam bidang ini tidak bisa dilatih secara singkat seperti pada bimbingan tes, dan tidak tergantung pada pencapaian kurikulum.

3. Model Seleksi Calon Mahasiswa Barui PTN

Terdapat dua faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan atau pengembangan model seleksi masuk ke perguruan tinggi. Faktor pertama adalah kelompok-kelompok yang mewakili kepentingan yang berbeda,

dan faktor kedua adalah kriteria seleksi (Sumadi Suryabrata, 1989: 2-4). Kelompok yang berbeda kepentingan tersebut adalah pihak perguruan tinggi, Pendidikan Menengah (SMA/MA, SMK), dan masyarakat luas; sedangkan kriteria seleksi yang dimaksud adalah (a) kecermatan prediksi, (b) efisiensi ekonomis, (c) dampak sistem seleksi terhadap proses belajar mengajar di SMTA, (d) keadilan dalam seleksi (*equity*). Keempat kriteria ini harus dipertimbangkan secara serempak.

Melalui pemetaan kedua faktor tersebut, diperoleh interaksi antara faktor pertama dengan faktor kedua, yaitu interaksi keempat kriteria seleksi dengan ketiga kelompok yang berbeda kepentingan. Interaksi yang dimaksud didasarkan atas penilaian terhadap berkepentingan atau tidaknya masing-masing kelompok dengan masing-masing kriteria yang ada. Interaksi tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Interaksi Antara Kelompok Berpentingan dengan Kriteria Seleksi

Pihak yang Berkepentingan	Kriteria Seleksi			
	Kecermatan Prediksi	Dampak thd PBM	Efisiensi Ekonomis	Keadilan
Perguruan Tinggi	****	*	***	**
Pend. Menengah	-	****	-	***
Masyarakat	-	-	****	****

Keterangan: **** = sangat berkepentingan
 *** = berkepentingan
 ** = kurang berkepentingan
 * = agak kurang berkepentingan
 - = tidak penting

Berdasarkan pada Tabel 1 tersebut di atas, nampak bahwa pihak pendidikan tinggi memprioritaskan kecermatan prediksi dan efisiensi ekonomis, sedangkan bagi masyarakat yang dianggap penting adalah keadilan (*equity*) dan efisiensi ekonomis. Pihak

Pendidikan Menengah (SMA/MA, SMK) berkeinginan agar sistem seleksi masuk perguruan tinggi membawa dampak positif bagi proses belajar mengajar di sekolah, dan faktor keadilan. Pada dasarnya kriteria tentang efisiensi dan dampak PBM di

sekolah sudah membaur pada aspek kecermatan prediksi dan keadilan (*equity*). Oleh karena itu, jika ditarik benang merahnya, maka ke depan diharapkan model seleksi calon mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri dapat mempertimbangkan faktor kecermatan dan keadilan (*equity*), sebagaimana fokus pembahasan makalah ini.

Suatu model seleksi yang memiliki kecermatan prediksi yang baik adalah apabila pelamar yang diterima sebagai mahasiswa baru (yang diprediksikan akan berhasil), akhirnya memang berhasil, sedangkan pelamar yang ditolak jika sekiranya mereka diterima akan gagal. Namun kenyataan, dalam praktek tidaklah sesederhana itu. Sebagian dari mereka yang diprediksikan akan berhasil ternyata gagal. Hal ini dapat disebabkan oleh kurang sempurnanya alat seleksi, namun dapat pula disebabkan oleh banyak hal lain yang mempengaruhi keberhasilan dalam belajar (yang tidak dibahas dalam makalah ini). Terlepas dari apa penyebabnya, kegagalan ini akan mengakibatkan rendahnya tingkat efisiensi internal suatu perguruan tinggi. Jika yang menjadi penyebab rendahnya daya prediksi yang bersumber dari alat seleksi, maka perlu dicari dan dikembangkan alat seleksi yang lebih tepat. Ringkasnya, alat seleksi harus dipilih/ditentukan sedemikian rupa sehingga kemelesetan prediksi dapat diperkecil.

Aspek kedua yang menjadi ciri dari model seleksi calon mahasiswa di perguruan tinggi yang ditawarkan dalam makalah ini adalah keadilan (*equity*). Secara umum, keadilan (*equity*) dapat didefinisikan sebagai sistem yang memberi kesempatan yang sama kepada semua anggota

masyarakat untuk memperoleh sesuatu dengan memperhatikan rasio legal dan rasio sosial (Sumadi Suryabrata, 2004; Secada, 1989). Selanjutnya, sistem seleksi yang adil adalah yang memberi keseimbangan kesempatan kepada semua calon yang memiliki potensi akademik yang tinggi untuk diterima di perguruan tinggi untuk menuju pada representasi kelompok (Djemari & Azwar, 1990).

4. Implementasi Model Seleksi

Untuk merealisasikan kebijakan model seleksi calon mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri yang akurat dan berkeadilan sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, dapat ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menentukan Sumber Calon

Berdasarkan pada model seleksi yang telah dikemukakan di atas, maka sumber calon mahasiswa dalam model ini terdiri dari lulusan SMU/MA, SMK dan orang luar. Orang luar yang dimaksud adalah Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI dan Polri yang mendapat tugas belajar dan orang-orang luar negeri.

Sumber calon mahasiswa yang diterima atas dasar peringkat UAN dan angka rapor dari masing-masing daerah harus berasal dari tamatan SMA/MA tahun terakhir, begitu juga bagi tamatan SMA/MA yang mengikuti ujian tertulis tes potensi akademik. Calon yang berasal dari lulusan SMK di samping berasal dari tamatan satu tahun terakhir juga mempunyai nilai rata-rata ijazah minimal 7,00.

Calon lulusan SMK hanya dapat mengikuti ujian tertulis seleksi yang kedua yaitu mengikuti ujian tertulis tes potensi akademik. Bagi mereka yang tidak lulus ujian seleksi

masuk, baik dari calon lulusan SMA/MA ataupun SMK untuk tahun berikutnya haknya sebagai sumber calon menjadi hilang. Untuk mengatasi hal ini, merak disalurkan ke Universitas Terbuka atau ke perguruan tinggi swasta.

Calon yang berasal dari orang luar (Pegawai Negeri Sipil, TNI dan POLRI serta orang luar negeri) diatur melalui aturan khusus. Aturan yang dikenakan kepada Pegawai Negeri Sipil, TNI dan POLRI ialah minimum sudah punyai masa kerja 2 tahun, mendapat DP3 selama dua tahun terakhir dengan nilai rata-rata baik, formasi mengizinkan. Di samping itu karena hal ini menyangkut kepegawaian, maka perlu diatur dengan surat keputusan bersama antar departemen yang terkait sekaligus dengan petunjuk pelaksanaannya. Aturan khusus bagi orang luar negeri yang ikut belajar di perguruan tinggi negeri misalnya dapat berbahasa Indonesia, mendapat ijin dari Pemerintah RI

b. Jumlah Calon yang mungkin dapat diterima

Berdasarkan kajian teoritis yang telah dibahas, masing-masing daerah ada kelompok calon yang merupakan bibit unggul daerah yang dipertimbangkan diterima langsung tanpa melalui ujian tertulis. Kelompok calon yang merupakan bibit unggul daerah tersebut populasinya “relatif kecil”, jika penjarangan bibit unggul daerah tersebut dilakukan dengan sangat ketat. Pernyataan ini menjadi dasar penulis dalam menentukan besarnya proporsi yang diterima pada masing-masing jalur seleksi dalam model seleksi ini.

Untuk itu dalam model seleksi ini, penulis menawarkan bahwa proporsi calon mahasiswa yang dapat diterima melalui jalur pertama (peringkat nilai UAN dan angka rapor masing-masing daerah) adalah sebesar 0,35 dari jumlah yang harus diterima secara nasional, sedangkan 0.65 lainnya dijangar melalui jalur seleksi kedua (ujian tertulis dengan tes potensi akademik).

Ringkasan kemungkinan proposi yang diterima dari dua jalur seleksi dengan sumber calon yang terkait dengan model seleksi ini disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Proporsi Penerimaan yang Diterima Menurut Jalur Seleksi dan Sumber Calon

Jalur Seleksi	Proporsi yang Diterima	Sumber Calon		
		SMA/MA	SMK	Orang luar
Peringkat Nilai Rata-rata UAN dan Rapor	0.35	+	-	-
Lulus Tes Potensi Akademik	0.65	+	+	+

Keterangan: + = sumber calon yang terkait,
- = sumber calon yang tidak terkait.

Sumber calon yang diterima atas peringkat nilai UN dan rapor berasal dari SMA/MA, sedangkan calon yang dijangar melalui tes potensi

akademik selain dari SMA/MA yang tidak terjaring melalui peringkat nilai UN dan angka rapor adalah dari tamatan SMK dan orang luar.

c. Kriteria Penerimaan

Implementasi model seleksi yang ditawarkan dalam makalah ini menerapkan dua kriteria penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri, yaitu (1) kriteria yang berkaitan dengan seleksi jalur pertama dan (2) kriteria yang berkaitan dengan seleksi jalur kedua. Kriteria seleksi jalur pertama diarahkan untuk menjangkir bibit unggul (yang terbaik) pada masing-masing daerah, dan kriteria yang kedua diarahkan untuk menjangkir calon lainnya yang mempunyai potensi akademik yang layak untuk belajar di perguruan tinggi.

Kriteria seleksi jalur pertama didasarkan atas peringkat nilai rata-rata UAN dan nilai rapor yang diraih calon selama belajar di SMA/MA. Agar nilai rapor dapat diperbandingkan dengan sekolah yang berbeda, maka nilai rapor dari semester I sampai VI diisi berdasarkan hasil ulangan bersama dengan menggunakan soal-soal yang sudah "dikalibrasi". Konsep kalibrasi ini yang membedakan dengan jenis seleksi sebelumnya. Nilai rapor kemudian digabungkan dengan nilai rata-rata UAN dalam satu format khusus yang dapat dibaca oleh komputer. Berdasarkan hasil analisis komputer ini diperoleh peringkat nilai rata-rata UAN dan angka rapor.

Kriteria seleksi jalur kedua, didasarkan pada skor yang diperoleh calon dalam ujian tertulis tes potensi akademik. Materi tes terdiri dari komponen verbal, kuantitatif dan penalaran.

Mengukur potensi akademik tidak sama dengan mengukur hasil belajar yang didasarkan atas pencapaian kurikulum. Dengan demikian dalam proses belajar nanti di

perguruan tinggi akan ada kelompok yang tidak dapat mengikuti kegiatan perkuliahan secara mantap, sehingga perguruan tinggi perlu membentuk "Program Matrikulasi dan Remediasi". Beberapa Perguruan Tinggi Negeri, seperti IPB dan UGM (hasil pengamatan penulis) telah menerapkan konsep matrikulasi ini. Namun yang dimaksudkan oleh penulis, program ini harus dilaksanakan secara terpadu dan melembaga secara nasional, sehingga wajib dilaksanakan oleh semua Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia. Program matrikulasi dan remediasi dapat dibuka pada semester I tahun pertama yang dimaksudkan untuk memberikan kesiapan materi dasar bagi mereka yang mengalami hambatan dalam mengikuti perkuliahan untuk mata kuliah tertentu.

d. Pelaksana

Manajemen yang digunakan dalam implementasi model seleksi calon mahasiswa baru yang akurat dan berkeadilan mengkombinasikan sistem manajemen desentralisasi dengan sentralisasi. Untuk beberapa kegiatan dapat dilaksanakan secara bersama-sama, misalnya dalam penyusunan/penulisan alat seleksi dapat dilakukan dengan sentralisasi, kemudian untuk pengadaan dan penyelenggaraannya dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang terkait (desentralisasi).

Di tingkat nasional perlu dibentuk Badan Testing Nasional, dimana personilnya terdiri dari ahli pengukuran, ahli bidang studi, ahli bidang kurikulum dan ahli bidang psikologi. Tugas badan ini, antara lain menyiapkan tes untuk semua mata pelajaran yang digunakan nanti dalam ujian bersama (semesteran) di SMA/MA, menyiapkan alat ukur (tes)

untuk mengukur potensi akademik bagi calon yang harus mengikuti ujian tertulis, dan memutuskan calon diterima atau tidak.

Di tingkat lokal perlu dibentuk Panitia Ujian Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (PUSMPTN), yang beranggotakan utusan perguruan tinggi yang terkait. Tugas panitia ini, antara lain perbanyak soal ujian, pelaksana ujian (pengawas, reproduksi, distribusi tes) dan mengolah data hasil ujian.

Di tingkat propinsi, pada Kantor Dinas Pendidikan masing-masing propinsi dibentuk bagian khusus yang menangani komputer untuk menganalisis nilai rata-rata UAN dan nilai rapor semester 1 s/d 6. Di samping itu, bagian khusus ini merupakan distributor soal ujian semesteran yang didrop dari Badan Testing Nasional, serta mengawasi jalannya ujian bersama (semesteran).

C. Penutup

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu: Pertama, Model seleksi calon mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri yang akurat dan berkeadilan merupakan pilihan alternatif yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Kedua, Model seleksi ini menerapkan dua jalur seleksi, yaitu (1) jalur pertama diarahkan untuk menjangkau bibit unggul (yang terbaik) pada masing-masing daerah menurut peringkat rata-rata nilai UAN dan nilai rapor semester 1 s/d 6 yang diperoleh dari hasil ulangan bersama dengan menggunakan soal-soal yang sudah "dikalibrasi", dan (2) jalur kedua diarahkan untuk menjangkau calon lainnya yang mempunyai potensi akademik yang layak untuk belajar di

perguruan tinggi melalui tes potensi akademik, Ketiga, Realisasi model seleksi ini dapat ditempuh melalui (a) penentuan sumber dan jumlah calon mahasiswa yang mungkin dapat diterima, (b) kriteria penerimaan dan (c) pelaksana. Sumber, jumlah calon yang mungkin dapat diterima dan kriteria penerimaan diatur melalui aturan khusus oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dengan memperhatikan konsep *equity*.

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan tersebut di atas, disarankan: (1) kepada pihak Depdiknas untuk dapat merealisasikan model seleksi ini. Langkah awal yang mungkin dapat dilakukan adalah sosialisasi kepada semua PTN dan Kantor Diknas Propinsi di seluruh Indonesia. Langkah selanjutnya, membenahan sistem dan perangkatnya, dan tahap ketiga adalah pelaksanaan dan pengawasan. Hasil pelaksanaan dan pengawasan dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan sistem, dan manajemen pada tahun-tahun berikutnya. (2) Perlu upaya tindak lanjut dari pelaksanaan model seleksi ini, yaitu pelaksanaan program matrikulasi dan remediasi bagi mahasiswa baru yang mengalami hambatan untuk mengikuti perkuliahan. Program ini dapat dilakukan pada tahun pertama secara melembaga dan terprogram.

DAFTAR PUSTAKA

- Algina J. & Crocker, L. 1986. *Introduction to Classical and Modern Test Theory*. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- Azwar, S. 1986. *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta: Liberty.
- Depdiknas. 2003. *Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang*

- Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas.
- , 2005. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Depdiknas-Balitbang.
- , *Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri* (<http://www.Depdiknas.Go.Id>. 2005)
- Sutton, R.E. (1989). *Will the using of Computers in Schools Lessen or enlarge inequity in Education?* Computers in New Zealand Schools, 1(2), 5-6.
- , (1992). *Equity and Computer in the Scholls: A Decade od Reseacrh*. Review Of Educational Research. American Educational Research Association. Vol. 61 . Number 4. Wasington D.C. AERA Central Office, Pub.
- Good., T. L., & Brophy, J.E. (1986). School effects. In M.C. Wittrock (Ed.), *Handbook of Research on Teaching* pp. 570-602. New York: Macmillan.
- Green, T.F. (1983). Excellence, Equity, and Equality. In L.S. Shulman & G. Sykes (Eds.), *Handbook of Teaching and Policy* (pp. 318-341). New York: Longman.
- Harvey, G., & Klein, S., (1989). Understanding and Measuring in Education: A Conceptual Framework. In W.G. Secada (Ed.). *Equity in Education* (pp. 43-67). New York: Falmer.
- Karlof, B. & Obstblom, S. 1993. *Benchmarking. A Signpost to Excellen in Quality and Productivity*. New York:: John Wiler & Sons
- Mardapi, Dj. & Azwar, S. (1990). *Equity pada Sistem Masuk Perguruan Tinggi Negeri*. Jakarta: Balitbang-Dikbud.
- Sumadi Suryabrata. 1989. *Seleksi Calon Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Surapranata, S. 2004. *Analisis, Validitas, Reliabilitas dan Interpretasi Hasil Tes*. Bandung: Rosdakarya.